

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah merupakan salah satu hal yang penting dalam mengevaluasi realita pencapaian Kinerja di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah, dapat diketahui informasi mengenai Perbandingan Kinerja yang dicapai masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dengan menggunakan data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melakukan analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015-2017, dapat dihitung menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

5.2 Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah. Dari hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Lampiran 2 dibuat ringkasan pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun
2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)						Rata-Rata Derajat Desentrali sasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan
		Tahun (%)							
		2015	Opini Tahun 2015	2016	Opini Tahun 2016	2017	Opini Tahun 2017		
1.	Kota Kupang	14,22	WDP	14,49	WDP	17,89	WDP	15,53	Rendah
2.	Kab. Kupang	6,30	DISCL AIME R	6,25	WDP	4,44	WDP	5,66	Sangat Rendah
3.	Kab. TTS	7,07	WDP	5,98	WDP	4,87	WDP	5,97	Sangat Rendah
4.	Kab. TTU	4,61	WDP	5,22	WDP	7,67	WDP	4,9	Sangat Rendah
5.	Kota Belu	9,80	WDP	9,16	WDP	8,11	WDP	9,02	Sangat Rendah
6.	Kabupaten Alor	4,98	WDP	4,80	WDP	5,57	WDP	5,12	Sangat Rendah
7.	Kabupaten Lembata	4,88	WDP	4,83	WDP	5,18	WDP	4,96	Sangat Rendah
8.	Kabupaten Flores Timur	5,62	WDP	4,74	WDP	3,48	WDP	4,61	Sangat Rendah
9.	Kabupaten Sikka	8,85	WDP	7,56	WTP	7,16	WTP	7,86	Sangat Rendah
10.	Kabupaten Ende	6,44	WDP	5,95	WDP	2,59	WDP	4,99	Sangat Rendah
11.	Kabupaten Nagekeo	4,55	WDP	4,11	WDP	6,54	WDP	5,07	Sangat Rendah
12.	Kabupaten Ngada	6,10	WDP	6,04	WDP	6,54	WDP	6,23	Sangat Rendah
13.	Kabupaten Manggarai Timur	5,78	WDP	5,11	WDP	3,06	WDP	4,65	Sangat Rendah
14.	Kabupaten Manggarai	7,79	WDP	7,33	WDP	7,90	WDP	7,67	Sangat Rendah
15.	Kabupaten Manggarai Barat	8,47	WDP	10,32	WDP	8,99	WDP	9,26	Sangat Rendah
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	6,12	WDP	5,19	WDP	10,54	WDP	7,28	Sangat Rendah

17.	Kabupaten Sumba Barat	8,49	WDP	8,90	WDP	10,06	WDP	9,15	Sangat Rendah
18.	Kabupaten Sumba Tengah	4,62	WDP	4,09	WDP	3,69	WDP	4,13	Sangat Rendah
19.	Kabupaten Sumba Timur	7,44	WTP	6,36	WTP	6,77	WDP	6,86	Sangat Rendah
20.	Kabupaten Sabu Raijua	6,09	WDP	5,64	WDP	6,83	WDP	6,19	Sangat Rendah
21.	Kabupaten Rote Ndao	4,55	WDP	4,07	WDP	3,51	WDP	4,04	Sangat Rendah
22.	Kabupaten Malaka	4,20	DISCL AIME R	4,44	WDP	3,42	WDP	12,06	Rendah

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Tabel 5.1 diatas, maka Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai berikut:

a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Pada Tahun 2015, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 5.1 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur memiliki kemampuan keuangan dengan predikat sangat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja dan ini berarti bahwa walaupun Kabupaten Sumba Timur mendapatkan Opini WTP dari BPK tetapi PAD dari Kabupaten Sumba Timur memiliki kemampuan sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal

rata-rata kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumba Timur sebesar 7,44% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.66.290.916.752,00 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.891.412.853.226,00 dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.95.967.895.873. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan.

Berdasarkan Lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Sumba Timur penyumbang PAD terbesarnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, Hasil Pajak Daerah dan penyumbang PAD terkecil adalah Hasil Retribusi Daerah.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini Non-WTP

Pada Tahun 2015, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 5.1 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini non-WTP sebanyak 21 Kabupaten/Kota tetapi yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan dengan predikat sangat rendah sebanyak 20 Kabupaten karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh 00,00 - 10,00% saja dan ini berarti bahwa PAD dari 20 Kabupaten memiliki kemampuan sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Sedangkan hanya Kota Kupang yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan dengan

predikat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi antara 10,01-20,00% walaupun tahun 2015 Kota Kupang mendapatkan opini WDP dari BPK atas Laporan Keuangan tetapi kinerja keuangan dari Kota Kupang berdasarkan Derajat Desentralisasi lebih baik dari pada Kabupaten Sumba Timur yang mendapatkan opini WTP dari BPK.

Kota Kupang menjadi urutan pertama dalam penyelenggaraan desentralisasi jika dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lainnya, yaitu dengan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 14,22% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.145.154.792.156,20 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.020.930.686.935,20 dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kupang mengalami defisit sebesar Rp.120.816.816.691. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan 21 Kabupaten lainnya, akan tetapi kemampuan pemerintah Kota Kupang masih dikategorikan rendah dalam penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah karena skala interval derajat desentralisasi yang diperoleh diantara 10,01%-20,00%. Sedangkan Kabupaten Malaka menjadi daerah yang memiliki kemampuan Derajat Desentralisasi Fiskal terburuk yaitu sebesar 4,20% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp.25.020.134.187 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.595.360.001.844,00 Hal ini terjadi karena Derajat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh Kabupaten Malaka sangat kecil dibandingkan dengan 22 Kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat rendah dan Kabupaten Malaka juga baru terbentuk sebagai Kabupaten sendiri. Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Malaka mengalami defisit sebesar Rp.63.316.541.769 Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa jumlah sumber-sumber PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT berbeda-beda dimana penyumbang PAD terbesar untuk Kota Kupang adalah berasal dari Hasil Pajak Daerah, selanjutnya secara beturut-turut diikuti oleh Hasil Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kabupaten Malaka sebagai Kabupaten yang memiliki Desentralisasi Fiskal terburuk tahun 2015, penyumbang PAD terbesarnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selanjutnya beturut-turut diikuti oleh Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pajak Daerah dan penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

b. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2016

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Pada Tahun 2016, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 5.1 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Sikka dan Sumba Timur yang memiliki kemampuan keuangan dengan predikat sangat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja dan ini berarti bahwa walaupun Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan Opini WTP dari BPK tetapi PAD Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur memiliki kemampuan sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumba Timur sebesar 6,36% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.68.222.357.517,63 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.072.364.499.688,63 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.90.039.860.037. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan. Dan rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata kinerja keuangan daerah Kabupaten Sikka sebesar 7,56% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli

Daerah sebesar Rp.80.269.749.570,99 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.061.462.517.991,99. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami defisit sebesar Rp.100.211.664.527. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan.

Berdasarkan Lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Sikka Penyumbang PAD terbesarnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan penyumbang PAD terkecil adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Kabupaten Sumba Timur penyumbang PAD terbesarnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, Hasil Pajak Daerah dan penyumbang PAD terkecil adalah Hasil Retribusi Daerah.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini Non-WTP

Pada Tahun 2016, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 5.1 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini non-WTP sebanyak 20 Kabupaten/Kota. 18 Kabupaten yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan dengan predikat sangat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh 00,00%-10,00% saja dan ini berarti bahwa PAD dari 18 Kabupaten memiliki kemampuan sangat rendah dalam

membiayai pembangunan daerahnya. Sedangkan Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan dengan predikat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi antara 10,01-20,00% walaupun tahun 2016 Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan opini WDP dari BPK atas Laporan Keuangan tetapi kinerja dari Kota Kupang dan Manggarai Barat berdasarkan Derajat Desentralisasi lebih baik dari pada Kabupaten Sikka dan Sumba Timur yang mendapatkan opini WTP dari BPK akan tetapi kemampuan Pemerintah daerah Kota Kupang dan Manggarai Barat masih dikategorikan rendah dalam membiayai pembangunan daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Kupang sebesar 14,49% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.165.449.023.460,93 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.141.379.963.658,93 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kota Kupang mengalami defisit sebesar Rp.317.467.748.889 hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan Kabupaten Manggarai Barat sebesar 10,32% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.91.068.685.754,22 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.882.145.842.702,22. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Manggarai Barat mengalami defisit sebesar Rp.132.479.859.763. Hal ini terjadi karena

Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang dan Manggarai Barat dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan 20 Kabupaten lainnya, akan tetapi kemampuan pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat masih dikategorikan rendah dalam penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah karena skala interval derajat desentralisasi yang diperoleh diantara 10,01%-20,00%. Sedangkan Kabupaten Rote Ndao menjadi daerah yang memiliki kemampuan Derajat Desentralisasi Fiskal terburuk yaitu sebesar 4,07% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.20.842.548.098,67 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.708.870.066.413,57. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Rote Ndao mengalami defisit sebesar Rp.54.326.917.831. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan hal ini terjadi karena Derajat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao sangat kecil dibandingkan dengan 21 Kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat rendah.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa jumlah sumber-sumber PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT berbeda-beda dimana penyumbang PAD terbesar untuk Kota Kupang adalah berasal

dari Hasil Pajak Daerah, selanjutnya secara beturut-turut diikuti oleh Hasil Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Manggarai Barat adalah berasal dari Hasil Pajak Daerah, selanjutnya secara beturut-turut diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Retribusi Daerah, dan penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kabupaten Rote Ndao sebagai Kabupaten yang memiliki Desentralisasi Fiskal terburuk tahun 2016, penyumbang PAD terbesarnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selanjutnya beturut-turut diikuti oleh Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pajak Daerah.

c. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Pada Tahun 2017, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 5.1 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Sikka yang memiliki kemampuan keuangan dengan predikat sangat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja dan ini berarti bahwa walaupun Kabupaten Sikka

mendapatkan Opini WTP dari BPK tetapi PAD Kabupaten Sikka memiliki kemampuan sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata kinerja keuangan daerah Kabupaten Sikka sebesar 7,16% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.71.250.272.488,17 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 994.311.104.321,38 dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami surplus sebesar Rp.5.166.175.458. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan.

Berdasarkan Lampiran 3 dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Sikka Penyumbang PAD terbesarnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan penyumbang PAD terkecil adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini Non-WTP

Pada Tahun 2017, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 5.1 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini non-WTP sebanyak 21 Kabupaten/Kota. 18 Kabupaten yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan dengan predikat sangat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh 00,00-10,00% saja dan ini berarti bahwa PAD dari 18 Kabupaten memiliki kemampuan sangat rendah dalam

membiayai pembangunan daerahnya. Sedangkan Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan dengan predikat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi antara 10,01-20,00% walaupun tahun 2017 Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat mendapatkan opini WDP dari BPK atas Laporan Keuangan tetapi kinerja dari Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Derajat Desentralisasi lebih baik dari pada Kabupaten Sikka yang mendapatkan opini WTP dari BPK akan tetapi kemampuan Pemerintah daerah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat masih dikategorikan masih rendah dalam membiayai pembangunan daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal yang tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 17,89% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.201.909.910.887,57 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.128.878.231.477,87. Dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kota Kupang mengalami surplus sebesar Rp.27.160.581.863. Hal ini terjadi karena Pendapatan Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah yang dianggarkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat

dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan 18 Kabupaten lainnya, akan tetapi kemampuan pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat masih dikategorikan rendah dalam penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah karena skala interval derajat desentralisasi yang diperoleh diantara 10,01% - 20,00%. Sedangkan Kabupaten Ende menjadi daerah yang memiliki kemampuan Derajat Desentralisasi Fiskal terburuk yaitu sebesar 2,59% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.26.803.342.750,26 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.035.567.660.052,36. Dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Ende mengalami defisit sebesar Rp.97.138.627.582. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan ini terjadi karena Derajat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao sangat kecil dibandingkan dengan 21 Kabupaten lainnya dan menunjukan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat rendah.

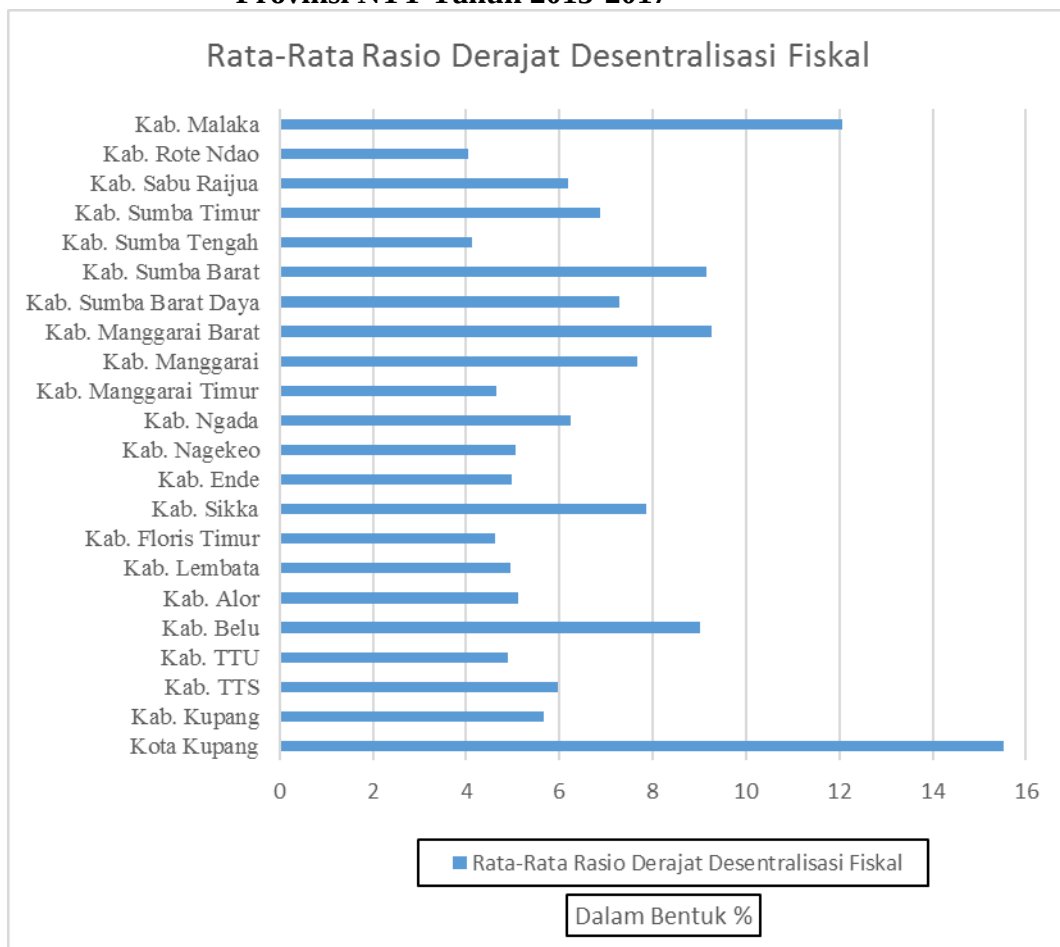
Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa jumlah sumber-sumber PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT berbeda-beda dimana penyumbang PAD terbesar untuk Kota Kupang adalah berasal dari Hasil Pajak Daerah, selanjutnya secara beturut-turut diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Retribusi Daerah, dan

penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kabupaten Ende sebagai Kabupaten yang memiliki Desentralisasi Fiskal terburuk tahun 2017, penyumbang PAD terbesarnya adalah Hasil Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Retribusi dan penyumbang PAD terkecil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.1 diatas, maka dibuat ringkasan perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rata-rata rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode penelitian tahun 2015-2017 seperti pada Grafik 5.1 dibawah ini:

Grafik 5.1
Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT Tahun 2015-2017



Berdasarkan gambar 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kab/Kota jika dilihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Tahun Anggaran 2015-2017, Kota Kupang memiliki rata-rata terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Terlihat bahwa Kota Kupang memiliki rata-rata Desentralisasi Fiskal sebesar 15,53% yang dikategorikan memiliki kemampuan daerah dengan predikat rendah karena skala interval derajat desentralisasi yang diperoleh antara 10,01%-20,00%. Hal ini menunjukan bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang dapat

dikatakan terbaik dibandingkan dengan 21 Kabupaten lainnya, akan tetapi kemampuan pemerintah daerah Kota Kupang masih dinyatakan rendah dalam penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah.

Sedangkan Kabupaten Kabupaten Rote Ndao memiliki rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal terburuk yaitu sebesar 4,04%. Hal ini terjadi karena Derajat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao sangat kecil dibandingkan 22 Kab/Kota lainnya. Kemampuan kinerja keuangan Kabupaten Rote Ndao dikategorikan masih sangat rendah karena skala interval yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan Desentralisasi masih sangat rendah.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Lampiran 2 dibuat ringkasan seperti pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Kemandirian Keuangan Daerah						Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
		Tahun (%)							
		2015	Opini Tahun 2015	2016	Opini Tahun 2016	2017	Opini Tahun 2017		
1.	Kota Kupang	20,72	WDP	17,85	WDP	24,46	WDP	21,01	Cukup
2.	Kab. Kupang	8,21	DISCL AIMER	7,5	WDP	5,43	WDP	7,05	Sangat Baik
3.	Kab. TTS	9,46	WDP	7,62	WDP	6,54	WDP	7,87	Sangat Baik
4.	Kab. TTU	5,86	WDP	6,33	WDP	9,95	WDP	7,38	Sangat Baik
5.	Kota Belu	12,52	WDP	11,06	WDP	9,72	WDP	11,1	Baik
6.	Kabupaten Alor	6,21	WDP	5,73	WDP	7,03	WDP	5,12	Sangat Baik
7.	Kabupaten Lembata	5,96	WDP	5,90	WDP	6,72	WDP	4,96	Sangat Baik
8.	Kabupaten Flores Timur	7,49	WDP	5,88	WDP	4,82	WDP	6,32	Sangat Baik
9.	Kabupaten Sikka	11.51	WDP	9,25	WTP	9,11	WTP	9,96	Sangat Baik
10.	Kabupaten Ende	8,67	WDP	7,79	WDP	3,42	WDP	6,63	Sangat Baik
11.	Kabupaten Nagekeo	5,51	WDP	4,85	WDP	5,86	WDP	5,41	Sangat Baik
12.	Kabupaten Ngada	7,74	WDP	7,68	WDP	8,30	WDP	7,91	Sangat Baik
13.	Kabupaten Manggarai Timur	7,38	WDP	6,38	WDP	3,84	WDP	5,87	Sangat Baik
14.	Kabupaten Manggarai	10,03	WDP	9,56	WDP	10,35	WDP	9,98	Sangat Baik
15.	Kabupaten Manggarai Barat	10,95	WDP	13,53	WDP	12,67	WDP	12,38	Baik
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	7,48	WDP	6,54	WDP	15,44	WDP	9,82	Sangat Baik
17.	Kabupaten	10,25	WDP	10,73	WDP	12,82	WDP	11,27	Baik

	Sumba Barat								
18.	Kabupaten Sumba Tengah	5,38	WDP	4,72	WDP	4,39	WDP	4,83	Sangat Baik
19.	Kabupaten Sumba Timur	9,30	WTP	7,60	WTP	8,45	WDP	8,45	Sangat Baik
20.	Kabupaten Sabu Raijua	7,06	WDP	6,58	WDP	8,36	WDP	7,33	Sangat Baik
21.	Kabupaten Rote Ndao	5,43	WDP	4,71	WDP	4,13	WDP	4,76	Baik
22.	Kabupaten Malaka	5,31	DISCL AIMER	5,42	WDP	4,16	WDP	4,96	Sangat Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tabel 5.2 diatas, maka perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015
 - a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Pada Tahun 2015, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel 5.2 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat baik karena presentase kemandirian keuangannya di antara 0,00%-10,00% saja dan kemampuan keuangan Kabupaten Sumba Timur dikategorikan sangat baik Dimana Kemandirian Keuangan Sumba Timur sebesar 9,30% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.66.290.916.752 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.712.810.225.350.

Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.95.967.895.873. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan ini berarti bahwa walaupun Kabupaten Sumba Timur mendapatkan Opini WTP dari BPK tetapi peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah-jumlah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda serta besarnya jumlah komponen-komponen Pendapatan Transfer yang diperoleh berbeda pula.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Sumba Timur adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus dan Komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun anggaran 2015 yang beropini non-WTP jika dilihat dari Tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikategorikan memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat baik

karena presentase kemandirian keuangannya diantara 0%-10% saja. Dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Kota Kupang tetap memiliki Kemandirian Keuangan terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya meskipun kemampuan keuangan Kota Kupang masih dikategorikan cukup Dimana Kemandirian Keuangan Kota Kupang sebesar 20,72% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.145.154.792.156,20 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.700.571.560.350,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kota Kupang mengalami defisit sebesar Rp.120.816.816.691. Hal ini terjadi karena Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan Hal ini menunjukkan bahwa bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, akan tetapi peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan daerahnya.

Sedangkan Kemandirian Keuangan terburuk diperoleh oleh Kabupaten Malaka yaitu sebesar 5,31% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.25.020.134.187,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.471.129.024.450,00. Diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Malaka mengalami defisit sebesar Rp.63.316.541.769.

Hal ini terjadi karena Kemandirian Keuangan yang diperoleh Kabupaten Malaka sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kemampuan keuangan Kabupaten Malaka dikategorikan sangat baik karena skala interval yang yang diperoleh antara 0,00% - 10,00% saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Malaka atau dengan kata lain pemerintah Kabupaten Malaka tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda serta besarnya jumlah komponen-komponen Pendapatan Transfer yang diperoleh berbeda pula.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kota Kupang adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus, dan komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil. Sedangkan Kabupaten Malaka sebagai Kabupaten yang memiliki Desentralisasi Fiskal terkecil Tahun 2015, komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kabupaten Malaka adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus, dan komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

b. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Tahun 2016

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Pada Tahun 2016, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel 5.2 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat baik karena presentase kemandirian keuangannya di antara 0,00%-10,00% saja dan kemampuan keuangan Kabupaten Sikka dikategorikan sangat baik dimana Kemandirian Keuangan Kabupaten Sikka sebesar 9,25% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.80.269.749.570,99 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.868.141.530.905,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami defisit sebesar Rp.100.211.664.527 dan kemampuan keuangan Kabupaten Sumba Timur dikategoikan sangat baik dimana Kemandirian Keuangan Kabupaten Sumba Timur sebesar 7,60% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.68.222.357.517,63 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.897.062.773.691,00 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.90.039.860.037.

ini berarti bahwa walaupun Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan Opini WTP dari BPK tetapi peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda serta besarnya jumlah komponen-komponen Pendapatan Transfer yang diperoleh berbeda pula.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kabupaten Sikka adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus dan Komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Transfer terbesar untuk Kabupaten Sumba Timur adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus dan Komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun anggaran 2016 yang beropini non-WTP jika dilihat dari Tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikategorikan memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat baik karena presentase kemandirian keuangannya diantara 0%-10% saja.

Dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Kota Kupang tetap memiliki Kemandirian Keuangan terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya meskipun kemampuan keuangan Kota Kupang masih dikategorikan cukup Dimana Kemandirian Keuangan Kota Kupang sebesar 17,85% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp165.449.023.460,93 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.926.862.260.026,00 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kota Kupang mengalami defisit sebesar Rp.317.467.748.889. dan Hal ini menunjukkan bahwa bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, akan tetapi peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan daerahnya.

Sedangkan Kemandirian Keuangan terburuk diperoleh oleh Kabupaten Rote Ndao yaitu sebesar 4,71% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.28.842.548.098,57 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.612.526.648.394. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Rote Ndao mengalami defisit sebesar Rp.54.326.917.831. Hal ini terjadi karena Kemandirian Keuangan yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kemampuan keuangan Kabupaten Rote Ndao dikategorikan sangat baik karena skala interval

yang yang diperoleh antara 0,00% - 10,00% saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao atau dengan kata lain pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda serta besarnya jumlah komponen-komponen Pendapatan Transfer yang diperoleh berbeda pula.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kota Kupang adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus, dan komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

Kabupaten Rote Ndao sebagai Kabupaten yang memiliki Desentralisasi Fiskal terkecil Tahun 2016, komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kabupaten Rote Ndao adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus, dan komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

c. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Pada Tahun 2017, berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tabel 5.2 diatas, rata-rata Kinerja Keuangan Daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Sikka dengan memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat baik karena presentase kemandirian keuangannya di antara 0,00% - 10,00% saja dan kemampuan keuangan Kabupaten Sikka dikategorikan sangat baik Dimana Kemandirian Keuangan Kabupaten Sikka sebesar 9,11% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.71.250.272.488,17 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.781.738.364.148,00 Dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami surplus sebesar Rp.5.166.175.458. Hal ini berarti bahwa walaupun Kabupaten Sikka mendapatkan Opini WTP dari BPK tetapi peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda serta besarnya jumlah komponen-komponen Pendapatan Transfer yang diperoleh berbeda pula.

Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Sikka adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus dan Komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun anggaran 2017 yang beropini non-WTP jika dilihat dari Tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikategorikan memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat baik karena presentase kemandirian keuangannya diantara 0% - 10% saja. Dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Kota Kupang tetap memiliki Kemandirian Keuangan terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya meskipun kemampuan keuangan Kota Kupang masih dikategorikan cukup Dimana Kemandirian Keuangan Kota Kupang sebesar 24,46% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.201.909.910.887,57 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.825.397.062.315,00 dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kota Kupang mengalami surplus sebesar Rp.27.160.581.863. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan daerah Kota Kupang dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, akan tetapi peranan

pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan daerahnya.

Sedangkan Kemandirian Keuangan terendah diperoleh oleh Kabupaten Ende yaitu sebesar 3,42% dengan rincian APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.26.803.342.750,26 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.782.964.345.582,00 dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Ende mengalami defisit sebesar Rp.97.138.627.583. Hal ini terjadi karena Kemandirian Keuangan yang diperoleh Kabupaten Ende sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kemampuan keuangan Kabupaten Ende dikategorikan sangat baik karena skala interval yang yang diperoleh antara 0,00% - 10,00% saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Ende atau dengan kata lain pemerintah Kabupaten Ende tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang terhadap Pendapatan Daerah yang berbeda-beda serta besarnya jumlah komponen-komponen Pendapatan Transfer yang diperoleh berbeda pula.

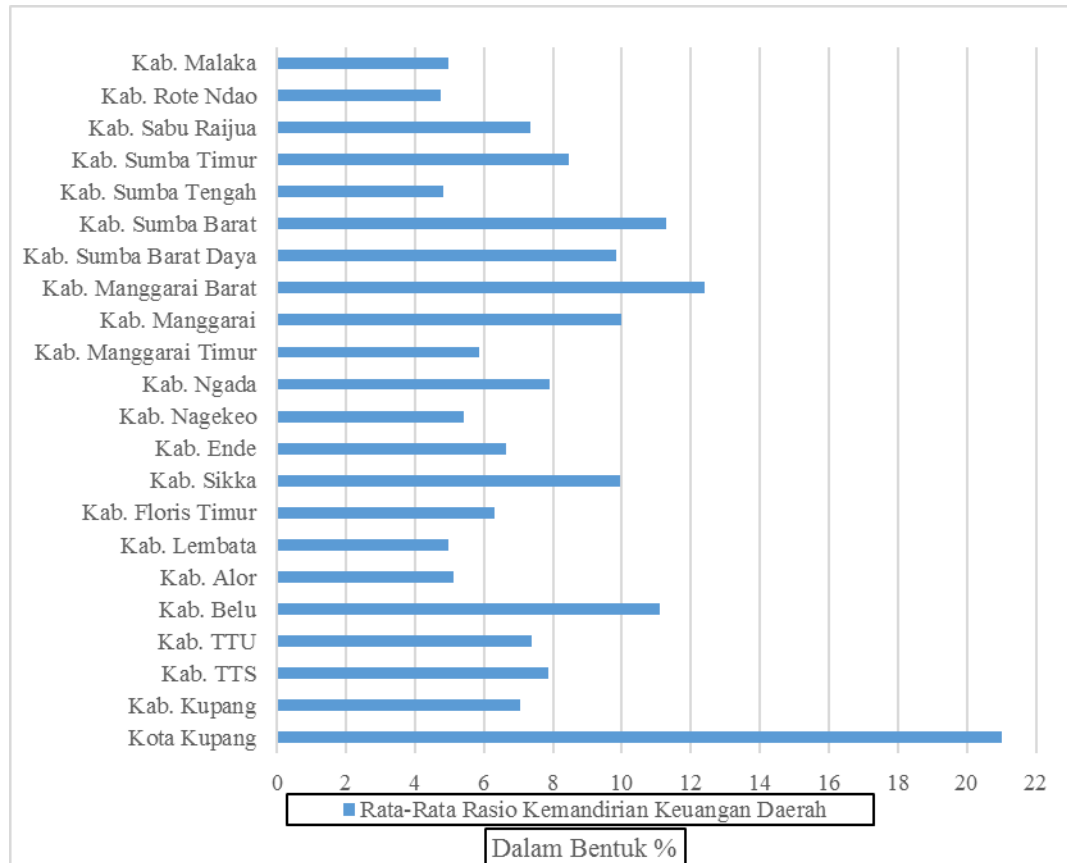
Berdasarkan Lampiran 3 diketahui bahwa komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kota Kupang adalah Dana Alokasi Umum,

selanjutnya Dana Alokasi Khusus, dan komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

Kabupaten Ende sebagai Kabupaten yang memiliki Desentralisasi Fiskal terkecil Tahun 2017, komponen Pendapatan Transfer terbesar untuk Kabupaten Ende adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya Dana Alokasi Khusus, dan komponen Pendapatan Transfer terkecil adalah Dana Bagi Hasil.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.2 diatas, dibuat ringkasan perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rata-rata rasio Kemandirian Keuangan Daerah seperti pada Grafik 5.2 dibawah ini:

Grafik 5.2
Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
NTT Tahun 2015-2017



Berdasarkan Grafik 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2015-2017, Kota Kupang memiliki rata-rata kemandirian keuangan terbaik yaitu sebesar 21,01% jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan Kota Kupang dapat dikatakan terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, akan tetapi peranan pemerintah pusat masih lebih dominan dari pada pemerintah Kota Kupang dalam pembangunan daerahnya. Sedangkan rata-rata kemandirian keuangan terendah diperoleh oleh Kabupaten Rote Ndao yaitu sebesar 4,76%. Hal ini

terjadi karena Kemandirian Keuangan yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Kemampuan keuangan Kabupaten Kabupaten Rote Ndao dikategorikan sangat baik dengan skala interval yang diperoleh antara 0,00%-10,00% saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao atau dengan kata lain pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Lampiran 2 dibuat ringkasan seperti pada Tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.3
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Efektivitas PAD						Rata- Rata Rasio Efektiva s PAD (%)	Kriteria Efektivitas
		Tahun (%)							
		2015	Opini Tahun 2015	2016	Opini Tahun 2016	2017	Opini Tahun 2017		
1.	Kota Kupang	116,01	WDP	114,53	WDP	97,16	WDP	109,23	Sangat Efektif
2.	Kab. Kupang	107,42	DISC LAIM ER	74,23	WDP	33,14	WDP	71,60	Kurang efektif
3.	Kab. TTS	117,03	WDP	94,33	WDP	39,89	WDP	83,75	Cukup efektif

4.	Kab. TTU	93,73	WDP	86,59	WDP	101,55	WDP	93,96	Efektif
5.	Kota Belu	112,20	WDP	121,44	WDP	78,71	WDP	104,12	Sangat Efektif
6.	Kabupaten Alor	67,54	WDP	99,03	WDP	83,52	WDP	83,36	Cukup efektif
7.	Kabupaten Lembata	106,98	WDP	112,58	WDP	102,98	WDP	107,51	Sangat Efektif
8.	Kabupaten Flores Timur	91,41	WDP	93,23	WDP	39,68	WDP	74,77	Kurang Efektif
9.	Kabupaten Sikka	99,16	WDP	81,20	WTP	49,86	WTP	76,74	Kurang Efektif
10.	Kabupaten Ende	90,36	WDP	109,74	WDP	22,94	WDP	74,35	Kurang Efektif
11.	Kabupaten Nagekeo	107,83	WDP	95,68	WDP	67,59	WDP	90,37	Efektif
12.	Kabupaten Ngada	107,30	WDP	100,03	WDP	81,63	WDP	96,32	Efektif
13.	Kabupaten Manggarai Timur	122,98	WDP	103,74	WDP	29,15	WDP	85,29	Cukup Efektif
14.	Kabupaten Manggarai	97,95	WDP	90,29	WDP	59,72	WDP	82,65	Cukup efektif
15.	Kabupaten Manggarai Barat	110,42	WDP	113,83	WDP	69,93	WDP	98,06	Efektif
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	111,94	WDP	102,82	WDP	105,50	WDP	106,75	Sangat Efektif
17.	Kabupaten Sumba Barat	105,85	WDP	108,84	WDP	81,32	WDP	98,67	Efektif
18.	Kabupaten Sumba Tengah	103,10	WDP	87,94	WDP	49,92	WDP	80,32	Cukup Efektif
19.	Kabupaten Sumba Timur	95,77	WTP	86,73	WTP	60,18	WDP	80,89	Cukup Efektif
20.	Kabupaten Sabu Raijua	103,06	WDP	87,43	WDP	66,92	WDP	85,80	Cukup Efektif
21.	Kabupaten Rote Ndao	94,20	WDP	103,26	WDP	84,48	WDP	93,98	Efektif
22.	Kabupaten Malaka	108,87	DISC LAIM ER	110,57	WDP	50,97	WDP	90,14	Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tabel 5.3 diatas, maka perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai berikut:

a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP Tahun 2015 yaitu Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, hal ini disebabkan karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%. Hal ini terjadi karena penerimaan PAD yang diperoleh lebih kecil dari target penerimaan PAD yang dianggarkan sebelumnya.

Kabupaten Sumba Timur memiliki tingkat efektivitas PAD efektif dengan rasio efektivitas PAD sebesar 95,77% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.66.290.916.752,00 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.69.216.398.782,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.95.967.895.873. Hal ini terjadi karena Kabupaten Sumba Timur belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah Realisasi PAD yang dicapai dan Target PAD yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Dilihat pada Tabel 5.3 Jika dibandingkan dengan Tingkat Efektivitas PAD untuk msing-masing daerah terlihat bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki tingkat efektivitas PAD terbaik dengan presentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan PAD sebesar 122,98% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.41.465.748.921,64 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.33.717.083.513,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Manggarai Timur mengalami defisit sebesar Rp.63.964.823.681. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah dirgetkan sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Alor memiliki Tingkat Efektivitas terkecil yaitu sebesar 67,54% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.39.889.986.785,74 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.50.057.804.766,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Alor mengalami defisit sebesar Rp.73.246.060.551. Hal ini terjadi sebaliknya dimana

Kabupaten Alor dapat dikatakan belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah dirgetkan sebelumnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah Realisasi PAD yang dicapai dan Target PAD yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

b. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2016

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP Tahun 2016 yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan cukup efektif, hal ini disebabkan karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%. Hal ini terjadi karena penerimaan PAD yang diperoleh lebih kecil dari target penerimaan PAD yang dianggarkan sebelumnya.

Kabupaten Sikka memiliki tingkat efektivitas PAD cukup efektif dengan rasio efektivitas PAD sebesar 81,20% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.80.269.749.570,99 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.98.858.138.792,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja

Kabupaten Sikka mengalami defisit sebesar Rp. Rp.100.211.664.527. dan Kabupaten Sumba Timur memiliki tingkat efektivitas PAD cukup efektif dengan rasio efektivitas PAD sebesar 86,73% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.68.222.357.517,63 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.78.663.755.972,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.90.039.860.037. Hal ini terjadi karena Kabupaten Sikka dan Sumba Timur belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah Realisasi PAD yang dicapai dan Target PAD yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Berdasarkan Tabel 5.3 jika dilihat dari Tingkat Efektivitas PAD untuk masing-masing daerah terlihat bahwa Kabupaten Belu memiliki tingkat efektivitas PAD terbaik dengan presentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan PAD sebesar 121,44% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.74.823.080.564,95 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.64.906.714.769,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran

pendapatan dan belanja Kabupaten Belu mengalami defisit sebesar Rp. Rp.96.145.135.507. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah dirgetkan sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Kupang memiliki Tingkat Efektivitas terkecil yaitu sebesar 74,23% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.73.214.731.552,25 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.98.635.973.808,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kupang mengalami defisit sebesar Rp. Rp.208.806.167.507. Hal ini terjadi sebaliknya dimana Kabupaten Kupang dapat dikatakan belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah dirgetkan sebelumnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah Realisasi PAD yang dicapai dan Target PAD yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

c. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP Tahun 2017 yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sikka jika dilihat dari Rasio Efektivitas

PAD dapat dikategorikan tidak efektif, hal ini disebabkan karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%. Hal ini terjadi karena penerimaan PAD yang diperoleh lebih kecil dari target penerimaan PAD yang dianggarkan sebelumnya.

Kabupaten Sikka memiliki tingkat efektivitas PAD tidak efektif dengan rasio efektivitas PAD sebesar 49,86% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.71.250.272.488,17 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.142.894.813.580,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami surplus sebesar Rp.5.166.175.458. Hal ini terjadi karena Kabupaten Sikka belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah Realisasi PAD yang dicapai dan Target PAD yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

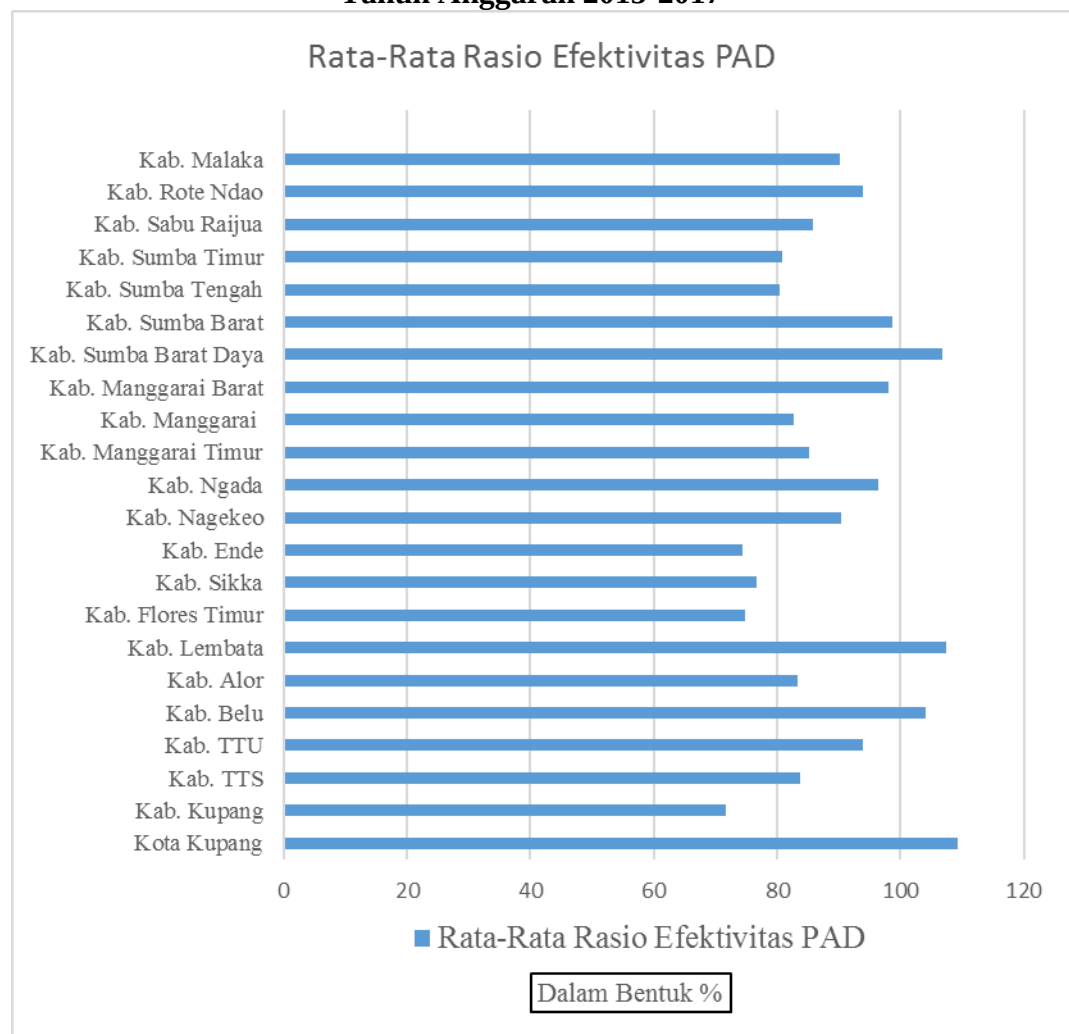
Berdasarkan Tabel 5.3 jika dilihat dari Tingkat Efektivitas PAD untuk masing-masing daerah terlihat bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tingkat efektivitas PAD terbaik dengan presentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target Penerimaan PAD sebesar

105,50% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.99.776.097.079,00 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.94.572.873.937,53. Dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami defisit sebesar Rp.17.919.345.423. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah dirgetkan sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Ende memiliki Tingkat Efektivitas terkecil yaitu sebesar 22,94% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.26.803.342.750,26 dan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.116.855.595.816,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Ende mengalami defisit sebesar Rp.97.138.627.583 Hal ini terjadi sebaliknya dimana Kabupaten Ende dapat dikatakan belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah dirgetkan sebelumnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh besarnya jumlah Realisasi PAD yang dicapai dan Target PAD yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.3 diatas, dibuat ringkasan perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD seperti pada Grafik 5.3 di bawah ini:

Grafik 5.3
Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2015-2017



Berdasarkan gambar Grafik 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD pada Tahun Anggaran 2015-2017, Kota Kupang

memiliki rata-rata terbaik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Terlihat bahwa Kota Kupang memiliki rata-rata efektivitas PAD sebesar 109,23% yang dikategorikan memiliki kriteria efektivitas dengan predikat sangat efektif yaitu diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kupang mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan Kabupaten yang memperoleh efektivitas PAD terkecil adalah Kabupaten Kupang dengan rata-rata efektivitas PAD sebesar 71,41%. Hal ini terjadi sebaliknya dimana Kabupaten Kupang dapat dikatakan belum mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

1) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi Belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaiknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah pada Lampiran 2 dibuat ringkasan seperti pada Tabel 5.4 dibawah ini:

Tabel 5.4
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Efisiensi Belanja Daerah						Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah (%)	Presen tase Efisie nsi
		Tahun (%)							
		2015	Opini Tahun 2015	2016	Opini Tahun 2016	2017	Opini Tahun 2017		
1.	Kota Kupang	85,62	WDP	88,70	WDP	87,54	WDP	87,29	Efisien
2.	Kab. Kupang	72,51	DISCL AIMER	89,73	WDP	85,04	WDP	82,43	Efisien
3.	Kab. TTS	82,23	WDP	86,31	WDP	82,61	WDP	83,72	Efisien
4.	Kab. TTU	83,44	WDP	84,58	WDP	87,06	WDP	85,03	Efisien
5.	Kota Belu	88,99	WDP	85,33	WDP	85,83	WDP	86,72	Efisien
6.	Kabupaten Alor	85,73	WDP	89,59	WDP	95,13	WDP	90,15	Efisien
7.	Kabupaten Lembata	83,63	WDP	87,87	WDP	94,02	WDP	88,51	Efisien
8.	Kabupaten Flores Timur	89,91	WDP	94,19	WDP	89,97	WDP	91,36	Efisien
9.	Kabupaten Sikka	87,32	WDP	84,57	WTP	80,78	WTP	84,22	Efisien
10.	Kabupaten Ende	80,16	WDP	82,09	WDP	85,09	WDP	82,45	Efisien
11.	Kabupaten Nagekeo	80,39	WDP	89,43	WDP	84,61	WDP	84,81	Efisien
12.	Kabupaten Ngada	88,92	WDP	91,39	WDP	94,67	WDP	91,66	Efisien
13.	Kabupaten Manggarai Timur	92,18	WDP	93,78	WDP	87,31	WDP	91,09	Efisien
14.	Kabupaten Manggarai	93,92	WDP	91,90	WDP	90,09	WDP	91,97	Efisien
15.	Kabupaten Manggarai Barat	83,14	WDP	94,27	WDP	88,44	WDP	88,62	Efisien
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	85,09	WDP	81,92	WDP	89,51	WDP	85,51	Efisien
17.	Kabupaten Sumba Barat	82,33	WDP	88,03	WDP	87,78	WDP	86,05	Efisien
18.	Kabupaten Sumba	88,80	WDP	92,83	WDP	91,14	WDP	90,92	Efisien

	Tengah								
19.	Kabupaten Sumba Timur	89,69	WTP	88,32	WTP	87,82	WDP	88,61	Efisien
20.	Kabupaten Sabu Raijua	81,35	WDP	84,79	WDP	68,32	WDP	78,15	Efisien
21.	Kabupaten Rote Ndao	89,80	WDP	91,04	WDP	98,18	WDP	93,01	Efisien
22.	Kabupaten Malaka	73,99	DISCL AIMER	78,98	WDP	86,03	WDP	79,67	Efisien

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kab/Kota di provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP dari BPK yaitu Kabupaten Sumba Timur, pada tahun 2015 Kabupaten Sumba Timur mendapatkan kriteria efisiensi sebesar 89,69% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.897.350.760.740,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.000.504.754.373,60 dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp. 95.967.895.873 artinya kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah dapat dikatakan Efisien karena kriteria efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam meminimalisir pengeluaran yang ada.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah dapat dikatakan Efisien karena kriteria efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%.

Pada Tahun 2015, Kabupaten Kupang memperoleh predikat Efisiensi Belanja terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Dimana Efisiensi Belanja Kabupaten Kupang sebesar 72,51% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.909.247.570.817,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.253.921.843.081,37. Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kupang mengalami defisit sebesar Rp.118.490.037.822. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam meminimalisir pengeluaran yang ada. Sedangkan urutan terakhir diperoleh oleh Kabupaten Manggarai dengan Efisiensi Belanja sebesar 93,92% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.964.939.871.703 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.027.437.000.687,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2015, anggaran pendapatan dan belanja

Kabupaten Manggarai mengalami Defisit sebesar Rp.59.344.618.053. Hal ini terjadi karena Efisiensi Belanja Daerah yang diperoleh Kabupaten Manggarai lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini disebabkan oleh Realisasi Belanja yang digunakan dan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

b. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2016

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kab/Kota di provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP dari BPK yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur, pada tahun 2015 Kabupaten Sikka mendapatkan kriteria efisiensi sebesar 84,57% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.1.031.425.734.211,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.219.581.664.527,18 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami defisit sebesar Rp.100.211.664.527 dan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan kriteria efisiensi sebesar 88,32%, dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.1.057.369.125.121,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar

Rp.1.197.159.404.452,60 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar Rp.90.039.860.038 artinya kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah dapat dikatakan Efisien karena kriteria efisiensi yang diperoleh dari kedua Kabupaten tersebut kurang dari 100%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur dalam meminimalisir pengeluaran yang ada.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun anggaran 2016 jika dilihat dari Tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah dapat dikatakan Efisien karena kriteria efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%.

Pada Tahun 2016, Kabupaten Malaka memperoleh predikat Efisiensi Belanja terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Dimana Efisiensi Belanja Kabupaten Malaka sebesar 78,98% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.705.984.084.768,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.893.917.372.009,00. Dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Malaka mengalami defisit sebesar Rp.138.767.191.405. Hal

ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dalam meminimalisir pengeluaran yang ada. Sedangkan urutan terakhir diperoleh oleh Kabupaten Manggarai Barat dengan Efisiensi Belanja sebesar 94,27% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.902.795.674.651,60 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.957.633.537.012,78 dan diketahui bahwa pada tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Manggarai Barat mengalami defisit sebesar Rp.132.479.859.764. Hal ini terjadi karena Efisiensi Belanja Daerah yang diperoleh Kabupaten Manggarai Barat lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini disebabkan oleh Realisasi Belanja yang digunakan dan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

c. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kab/Kota di provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP dari BPK yaitu Kabupaten Sikka, pada tahun

2017 Kabupaten Sikka mendapatkan kriteria efisiensi sebesar 80,78% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.989.144.928.862,46 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.224.457.316.547,17 dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka mengalami surplus sebesar Rp.59.982.316.547 artinya kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah dapat dikatakan Efisien karena kriteria efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam meminimalisir pengeluaran yang ada.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun anggaran 2017 jika dilihat dari Tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah dapat dikatakan Efisien karena kriteria efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%.

Pada Tahun 2017, Kabupaten Sabu Raijua memperoleh predikat Efisiensi Belanja terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Dimana Efisiensi Belanja Kabupaten Sabu Raijua sebesar 68,32% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.435.820.282.457,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar

Rp.637.854.904.221,02 dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sabu Raijua mengalami surplus sebesar Rp.25.699.411.255. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya.

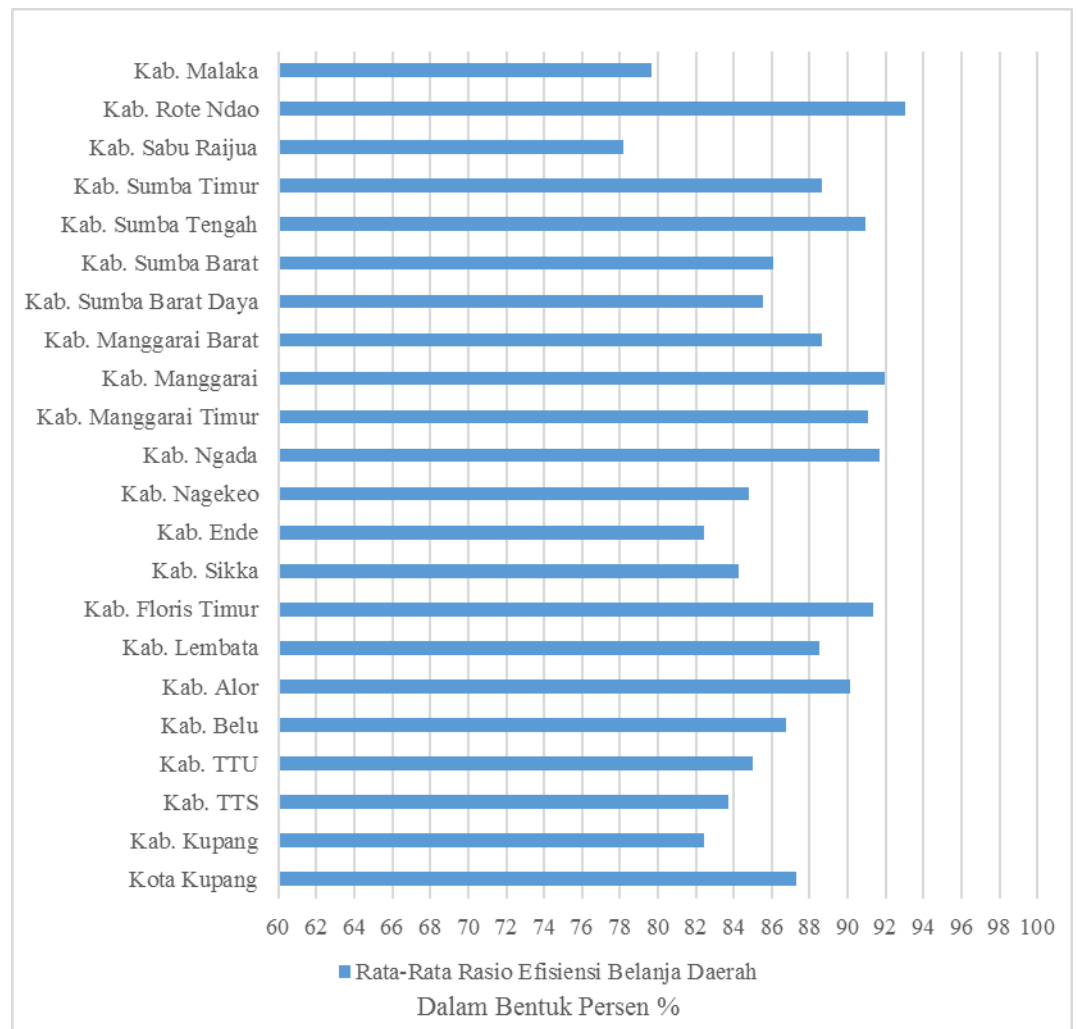
Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam meminimalisir pengeluaran yang ada. Sedangkan urutan terakhir diperoleh oleh Kabupaten Rote Ndao dengan Efisiensi Belanja sebesar 98,18% dengan rincian APBD yaitu Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.702.400.476.914,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.715.396.690.554,00 dan diketahui bahwa pada tahun 2017, anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Rote Ndao mengalami surplus sebesar Rp.4.878.812.000. Hal ini terjadi karena Efisiensi Belanja Daerah yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini disebabkan oleh Realisasi Belanja yang digunakan dan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.4 diatas, dibuat ringkasan perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rata-rata rasio efisiensi belanja

daerah selama periode penelitian tahun 2015-2017 seperti pada Grafik 5.4 dibawah ini:

Grafik 5.4
Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT Tahun 2015-2017



Berdasarkan gambar Grafik 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rata-rata Efisiensi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015-2017, dikategorikan efisien karena kriteria presentase efisiensinya dibawah 100%. Namun jika

dibandingkan untuk masing-masing daerah, Kabupaten Sabu Raijua memiliki efisiensi terbaik dengan presentase rata-rata efisiensi belanja sebesar 78,15%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah yang digunakan lebih kecil dari target anggaran belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam meminimalisir pengeluaran yang ada. Sedangkan Kabupaten Rote Ndao yang memiliki efisiensi terburuk yaitu sebesar 93,01%. Hal ini terjadi karena Efisiensi Belanja Daerah yang diperoleh Kabupaten Rote Ndao lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

2) Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Dari hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Lampiran 2 dibuat ringkasan seperti pada Tabel 5.5 dan Tabel 5.6 dibawah ini:

Tabel 5.5
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Langsung)
Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Rasio Belanja Langsung						Rata-Rata Rasio Belanja Langsung (%)
		Tahun (%)						
		2015	Opini Tahun 2015	2016	Opini Tahun 2016	2017	Opini Tahun 2015	
1.	Kota Kupang	37,63	WDP	42,51	WDP	56,62	WDP	45,59
2.	Kab. Kupang	41,06	DISCL AIMER	50,77	WDP	42,93	WDP	44,92

3.	Kab. TTS	33,94	WDP	35,73	WDP	35,91	WDP	35,19
4.	Kab. TTU	38,63	WDP	39,04	WDP	39,21	WDP	38,96
5.	Kota Belu	46	WDP	47,01	WDP	53,07	WDP	48,69
6.	Kabupaten Alor	48,99	WDP	45,94	WDP	49,67	WDP	48,2
7.	Kabupaten Lembata	40,54	WDP	41,02	WDP	38,96	WDP	40,17
8.	Kabupaten Flores Timur	38,22	WDP	36,73	WDP	36,69	WDP	37,21
9.	Kabupaten Sikka	40,28	WDP	40,38	WTP	37,63	WTP	39,43
10.	Kabupaten Ende	37,13	WDP	36,51	WDP	34,17	WDP	35,94
11.	Kabupaten Nagekeo	48,79	WDP	53,75	WDP	48,70	WDP	50,41
12.	Kabupaten Ngada	42,27	WDP	46,21	WDP	47,10	WDP	45,19
13.	Kabupaten Manggarai Timur	49,22	WDP	46,25	WDP	43,95	WDP	46,47
14.	Kabupaten Manggarai	50,32	WDP	50,38	WDP	45,90	WDP	48,87
15.	Kabupaten Manggarai Barat	58,64	WDP	48,55	WDP	49,77	WDP	52,32
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	58,64	WDP	51,54	WDP	52,86	WDP	54,35
17.	Kabupaten Sumba Barat	58,64	WDP	65,55	WDP	62,05	WDP	62,08
18.	Kabupaten Sumba Tengah	67,10	WDP	57,93	WDP	59,05	WDP	61,36
19.	Kabupaten Sumba Timur	49,03	WTP	47,71	WTP	49,24	WDP	48,66
20.	Kabupaten Sabu Raijua	69,91	WDP	64,20	WDP	51,26	WDP	61,79
21.	Kabupaten Rote Ndao	52,91	WDP	52,88	WDP	48,88	WDP	51,56
22.	Kabupaten Malaka	37,92	DISCL AIMER	48,52	WDP	50,83	WDP	45,76

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019.

Tabel 5.6
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Kesenjangan (Belanja Tidak
Langsung)
Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Rasio Belanja Tidak Langsung						Rata-Rata Belanja Tidak Langsung (%)
		Tahun (%)						
		2015	Opini Tahun 2015	2016	Opini Tahun 2016	2017	Opini Tahun 2017	
1.	Kota Kupang	62,37	WDP	57,49	WDP	43,38	WDP	54,41
2.	Kab. Kupang	58,94	DISCL AIMER	49,23	WDP	57,07	WDP	55,08
3.	Kab. TTS	66,06	WDP	64,26	WDP	64,08	WDP	64,8
4.	Kab. TTU	61,37	WDP	60,96	WDP	60,79	WDP	61,04
5.	Kota Belu	53,10	WDP	52,99	WDP	46,93	WDP	51,01
6.	Kabupaten Alor	51	WDP	54,06	WDP	50,33	WDP	51,80
7.	Kabupaten Lembata	59,46	WDP	59,98	WDP	61,04	WDP	60,16
8.	Kabupaten Flores Timur	61,78	WDP	63,27	WDP	63,31	WDP	62,79
9.	Kabupaten Sikka	59,72	WDP	59,62	WTP	62,37	WTP	60,57
10.	Kabupaten Ende	62,87	WDP	63,49	WDP	65,83	WDP	64,06
11.	Kabupaten Nagekeo	51,21	WDP	46,25	WDP	51,30	WDP	59,59
12.	Kabupaten Ngada	57,73	WDP	53,79	WDP	52,90	WDP	54,81
13.	Kabupaten Manggarai Timur	50,78	WDP	53,75	WDP	56,04	WDP	53,52
14.	Kabupaten Manggarai	49,68	WDP	49,62	WDP	54,09	WDP	51,13
15.	Kabupaten Manggarai Barat	52,33	WDP	51,45	WDP	50,22	WDP	51,33
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	39,32	WDP	48,46	WDP	47,14	WDP	44,97
17.	Kabupaten Sumba Barat	41,36	WDP	34,45	WDP	37,95	WDP	37,92

18.	Kabupaten Sumba Tengah	32,90	WDP	42,07	WDP	40,95	WDP	38,64
19.	Kabupaten Sumba Timur	50,97	WTP	52,29	WTP	50,76	WDP	51,34
20.	Kabupaten Sabu Raijua	30,09	WDP	35,79	WDP	48,74	WDP	38,21
21.	Kabupaten Rote Ndao	47,09	WDP	47,12	WDP	51,12	WDP	48,44
22.	Kabupaten Malaka	62,08	DISCL AIMER	51,47	WDP	49,17	WDP	54,24

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kesenjangan Belanja Daerah pada Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, maka perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai berikut:

a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

a) Kabupaten yg beropini WTP di Provinsi NTT Tahun 2015

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumba Timur rasio belanja langsung sebesar 49,03% terhadap total belanja dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung sebesar 50,97% terhadap belanja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kabupaten Sumba Timur tahun 2015, alokasi belanja diprioritaskan pada belanja tidak langsung. Seharusnya belanja langsung harus lebih diprioritaskan dari pada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

b) Kabupaten yg beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun 2015

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa Kabupaten Sabu Raijua menjadi urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dimana belanja langsung Kabupaten Sabu Rajua sebesar 69,91% dan belanja tidak langsung sebesar 30,09% Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2015, alokasi belanja sudah diprioritaskan pada belanja langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Sedangkan keserasian belanja terkecil diperoleh oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan belanja langsung sebesar 33,94% dan rasio belanja tidak langsung sebesar 66,06% Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015, alokasi belanja diprioritaskan pada belanja tidak langsung. Seharusnya belanja langsung harus lebih diprioritaskan dari pada belanja tidak langsung karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja ini disebabkan oleh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dikeluarkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

b. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2016

a) Kabupaten yg beropini WTP di Provinsi NTT Tahun 2016

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumba Timur lebih unggul dari pada Kabuapten Sikka. Dimana rasio belanja langsung Kabupaten Sumba Timur sebesar 47,71% terhadap total belanja dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung sebesar 52,92% terhadap belanja, sedangkan Kabupaten Sikka rasio belanja langsung sebesar 40,38% dan belanja tidak langsung sebesar 59,62%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka tahun 2016, alokasi belanja masih diprioritaskan pada belanja tidak langsung. Seharusnya belanja langsung harus lebih diprioritaskan dari pada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

b) Kabupaten yg beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun 2016

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 jika dilihat dari Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumba Barat menjadi urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dimana belanja langsung Kabupaten Sumba Barat sebesar 65,55% dan belanja tidak langsung sebesar 34,45%, sedangkan

keserasian belanja terkecil diperoleh oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan belanja langsung sebesar 35,73%% dan rasio belanja tidak langsung sebesar 64,26%.

Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah anatar Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja ini disebabkan oleh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dikeluarkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

c. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

a) Kabupaten yg beropini WTP di Provinsi NTT Tahun 2017

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 jika dilihat dari Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sikka memiliki rasio belanja langsung sebesar 37,63% terhadap total belanja sebesar dibandingkan dengan rasio belanja langsung sebesar 62,37% terhadap belanja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kabupaten Sikka masih memprioritaskan belanja langsung walaupun tahun 2016, alokasi belanja sudah mulai diprioritaskan pada belanja tidak langsung. Seharusnya belanja langsung harus lebih diprioritaskan daripada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

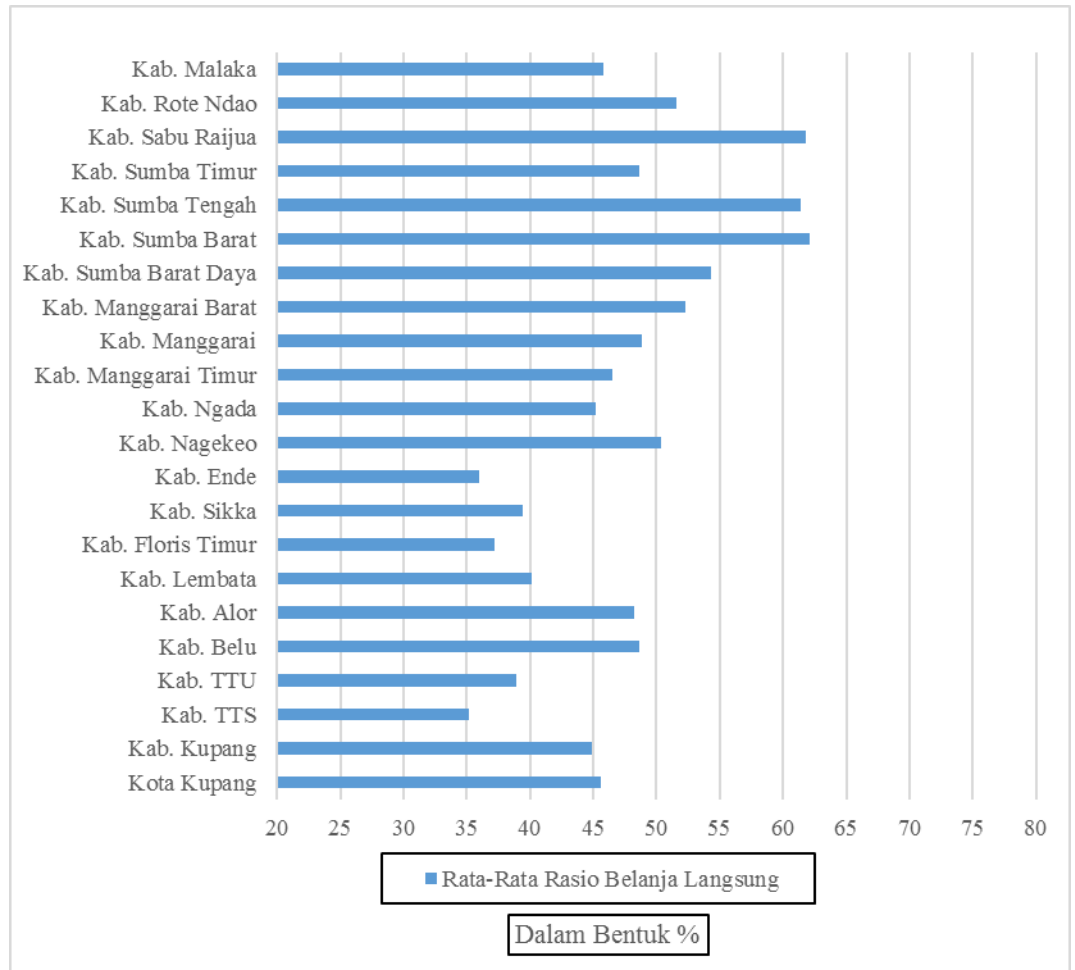
b) Kabupaten yg beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun 2017

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.5 dan 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumba Barat menjadi urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dimana belanja langsung Kabupaten Sumba Barat sebesar 62,05% dan belanja tidak langsung sebesar 30,09%, sedangkan keserasian belanja terkecil diperoleh oleh Kabupaten Ende dengan belanja langsung sebesar 34,17% dan rasio belanja tidak langsung sebesar 65,83%.

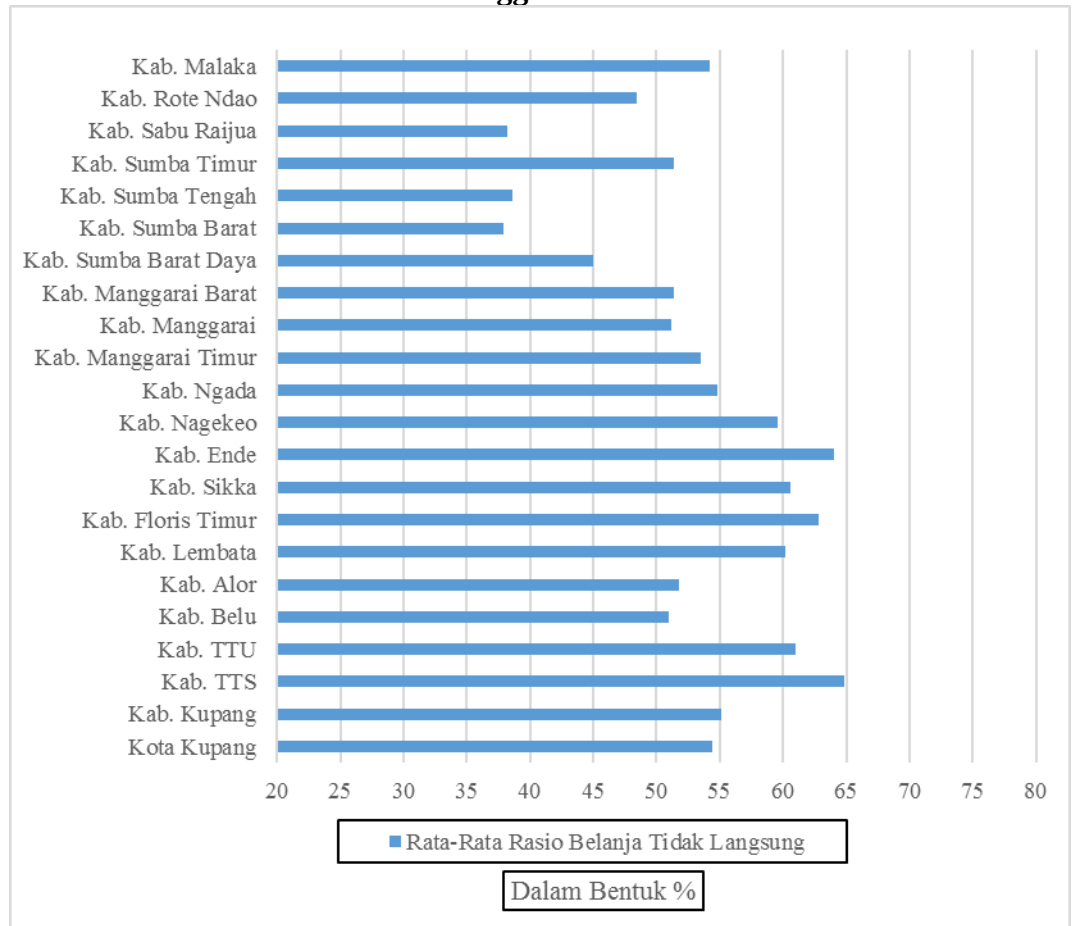
Perbandingan besar kecilnya Kinerja Keuangan Daerah anatar Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja ini disebabkan oleh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dikeluarkan berbeda-beda untuk setiap daerahnya.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.5 diatas, dibuat ringkasan perbandingan kinerja keuangan dilihat dari rata-rata rasio keserasian belanja daerah seperti pada Grafik 5.5 dan Grafik 5.6 dibawah ini:

Grafik 5.5
Rata-Rata Rasio Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi
NTT Tahun 2015-2017



Grafik 5.6
Rata-Rata Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT Tahun anggaran 2015-2017



Berdasarkan gambar Grafik 5.5 dan Grafik 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rata-rata Rasio keserasian Belanja pada Tahun Anggaran 2015-2017, Kabupaten Sabu Raijua memiliki rata-rata belanja langsung sebesar 61,79% dan belanja tidak langsung sebesar 38,21%. Hal ini dapat dikatakan baik karena adanya keserasian belanja daerah antara belanja langsung dan tidak langsung. Dimana Kabupaten Sabu Raijua lebih mengutamakan belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output untuk pembangunan daerah.

Sedangkan keserasian belanja terburuk diperoleh oleh Kabupaten TTS dengan belanja langsung sebesar 35,19% dan belanja tidak langsung sebesar 64,8%.

3. Analisis Pembiayaan

1. Perkembangan SiLPA

Pertumbuhan SiLPA dapat digunakan juga untuk menilai kinerja anggaran. SiLPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SiKPA, hal itu menindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah.

Tabel 5.7
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Anggaran 2015-2017

No	Kabupaten/ Kota	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dalam (RP)			Rata-Rata SiLPA
		2015	2016	2017	
1.	Kota Kupang	149,707,062,272.40	100,673,166,889.33	117,853,098,753.09	122.744.442.638
2.	Kab. Kupang	317,467,748,889.74	108,184,733,966.41	14,549,333,890.69	146.733.938.916
3.	Kab. TTS	224,088,257,362.48	108,911,545,969.48	92,182,125,748.30	141.727.309.693
4.	Kab. TTU	128,696,807,010.48	82,607,202,616.34	116,093,065,446.74	109.132.358.357
5.	Kota Belu	96,095,135,507.78	78,047,920,304.73	97,027,507,256.78	90.390.187.689
6.	Kabupaten Alor	91,032,173,881.00	47,144,564,628.48	37,412,094,205.92	58.529.610.905
7.	Kabupaten Lembata	93,977,329,163.40	52,494,308,743.94	41,968,088,337.16	62.813.242.081
8.	Kabupaten Flores Timur	70,176,998,012.01	48,637,815,027.37	41,755,148,258.26	53.523.320.432
9.	Kabupaten Sikka	103,711,664,527.18	129,956,122,308.17	64,969,180,005.09	99.545.655.613
10.	Kabupaten Ende	153,310,995,791.21	163,036,813,729.03	63,398,186,146.39	126.581.998.555
11.	Kabupaten Nagekeo	116,951,771,055.24	63,504,709,159.21	47,690,174,188.16	76.048.884.801
12.	Kabupaten	105,408,767,284.39	42,650,753,006.50	20,011,737,518.44	56.023.752.603

	Ngada				
13.	Kabupaten Manggarai Timur	65,675,444,258.47	62,179,797,757.47	47,453,795,132.27	58.436.345.716
14.	Kabupaten Manggarai	58,495,744,680.85	9,539,705,427.18	53,927,473,767.84	40.654.307.958
15.	Kabupaten Manggarai Barat	132,479,859,763.78	111,881,844,314.40	69,111,294,853.77	104.490.999.643
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	108,077,146,187.28	99,933,034,453.23	92,018,089,030.33	100.009.423.223
17.	Kabupaten Sumba Barat	104,989,964,860.88	76,386,405,097.39	45,637,884,869.81	75.671.418.275
18.	Kabupaten Sumba Tengah	60,900,640,266.18	29,612,972,569.85	24,963,342,335.10	38.492.318.390
19.	Kabupaten Sumba Timur	89,861,255,936.60	105,060,235,972.23	72,727,953,218.11	89.216.481.709
20.	Kabupaten Sabu Raijua	124,597,470,073.03	94,400,574,888.45	71,857,287,611.02	96.951.777.524
21.	Kabupaten Rote Ndao	59,231,917,831.96	49,342,414,651.53	57,516,141,639.87	55.363.491.374
22.	Kabupaten Malaka	156,283,441,405.39	97,367,145,634.34	91,085,580,716.72	114.912.055.918

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tabel 5.7 diatas, maka perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sebagai berikut:

a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

a) Kabupaten yg beropini WTP di Provinsi NTT Tahun 2015

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumba Timur Total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 89.861.255.936 dan pada tahun 2015 Kabupaten Sumba Timur mengalami defisit sebesar 5.937.907.514

dimana jumlah Belanja Daerah lebih besar dari pada Pendapatan daerah dan pembiayaan netto Kabupaten Sumba Timur sebesar 95.799.163.450.

b) Kabupaten yg beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun 2015

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 jika dilihat dari Tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa Kabupaten Kupang menjadi urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.317.467.748.889 dan pada tahun 2015 Kabupaten Kupang mengalami surplus sebesar Rp.158.792.129.915 dimana jumlah pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah, dan pembiayaan netto Kabupaten Kupang sebesar Rp.158.675.618.974 Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2015 terkecil diperoleh oleh Kabupaten Manggarai sebesar 58,495,744,680 dan pada tahun 2015 Kabupaten Manggarai mengalami defisit sebesar Rp.625.793.302. dimana jumlah pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Daerah, dan pembiayaan netto Kabupaten Manggarai sebesar Rp.59.121.537.983.

b. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2016

a) Kabupaten yg beropini WTP di Provinsi NTT Tahun 2016

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 jika dilihat dari Tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sikka lebih unggul dari pada Kabuapten

Sumba Timur. Dimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sikka sebesar 129.956.122.308 dan pada tahun 2016 Kabupaten Sikka mengalami surplus sebesar Rp.30.036.783.780 dimana jumlah Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Belanja Daerah dan pembiayaan netto Kabupaten Sikka sebesar 99.919.338.527.

b) Kabupaten yg beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun 2016

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 jika dilihat dari Tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa Kabupaten Ende Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 163.036.813.729 dan pada tahun 2016 Kabupaten Ende mengalami surplus sebesar Rp.12.225.817.937 dimana jumlah Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Belanja Daerah dan pembiayaan netto Kabupaten Ende sebesar Rp.150.810.995.791.

c. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017

a) Kabupaten yg beropini WTP di Provinsi NTT Tahun 2017

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 jika dilihat dari Tabel 5.7 diatas, bahwa Kabupaten Sikka lebih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sikka sebesar 64.969.180.005 dan pada tahun 2017 Kabupaten Sikka mengalami surplus sebesar Rp.5.166.175.458 dimana jumlah Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Belanja Daerah dan pembiayaan netto Kabupaten Sikka sebesar 99.919.338.527.

b) Kabupaten yg beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun 2017

Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten yang beropini non-WTP di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 jika dilihat dari Tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa Kota Kupang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 117,853,098,753 dan pada tahun 2017 Kabupaten Ende mengalami surplus sebesar Rp.27.160.581.863 dimana jumlah Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Belanja Daerah dan pembiayaan netto Kabupaten Ende sebesar Rp.117.853.098.753.

Berdasarkan gambar Tabel 5.7 diatas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT jika dilihat dari Rata-Rata Pertumbuhan Sisa Lebih pembiayaan Anggaran pada tahun 2015-2017, Kabupaten Kupang memiliki rata-rata terbaik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Terlihat bahwa Kabupaten Kupang memiliki rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan anggaran dari tahun 2015-2017 sebesar 146.733.938.916 Sedangkan Kabupaten yang memperoleh rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terkecil adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan rata-rata sebesar 38.492.318.390.